RELOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DAN REPRODUKSI KETIDAKSETARAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PIERRE BOURDIEU

Delfira Rahmatia Utami[1], Nur Rizki Febrianti[2], Galuh Locita Salsabila[3],
Mita Utami[4], Utami Pratiwi[5], Rudy Kurniawan[6]
[1-6]Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya
[1]delfiradelfi71@gmail.com, [2]nurrizkifebrianti10@gmail.com,
[3]galuhlocitasalsabilah@gmail.com , [4]mitautami542@gmail.com,
[5]utamipratiwi030@gmail.com, [6]rudykurniawan@fisip.unsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the reallocation of education funding in the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and its implications for the reproduction of social inequality from Pierre Bourdieu's perspective. Education, as a social field, is not a neutral space but an arena in which various forms of capital compete and shape opportunities for social mobility. The reallocation of education budgets to support the MBG program raises fiscal trade-offs that may weaken the emancipatory function of education, particularly for groups that rely heavily on public education services. This research employs a descriptive qualitative method through a literature study of policy documents, official reports, and relevant academic studies. The findings indicate that although the MBG program aims to improve human capital through nutritional interventions, the reallocation of education funding may exacerbate inequalities in the distribution of economic, cultural, social, and symbolic capital within the educational field. Such conditions potentially reinforce mechanisms of social reproduction through habitus and symbolic violence that operate subtly within the education system. Therefore, human development policies should be designed in a complementary manner to ensure that nutritional interventions do not undermine long-term investments in educational quality and equity.

Keywords: *budget reallocation, education, free nutritious meal program, social inequality, Pierre Bourdieu*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relokasi anggaran pendidikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta implikasinya terhadap reproduksi ketidaksetaraan sosial dalam perspektif Pierre Bourdieu. Pendidikan sebagai arena sosial tidak bersifat netral, melainkan menjadi ruang pertarungan berbagai bentuk modal yang menentukan peluang mobilitas sosial. Relokasi anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG berpotensi menciptakan trade-off fiskal yang dapat melemahkan fungsi emansipatoris pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada layanan pendidikan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap kebijakan, dokumen resmi, serta kajian akademik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, relokasi anggaran pendidikan dapat memperdalam ketimpangan distribusi modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik dalam arena pendidikan. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat mekanisme reproduksi sosial melalui habitus dan kekerasan simbolik yang bekerja secara halus dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan manusia perlu dirancang secara komplementer agar intervensi di bidang gizi tidak mengorbankan investasi jangka panjang dalam kualitas dan pemerataan pendidikan.

Kata kunci: relokasi anggaran, pendidikan, makan bergizi gratis, ketidaksetaraan sosial, Pierre Bourdieu

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah hak dari setiap warga negara sehingga negara memiliki kewajiban untuk dapat menjadi pemerataan akses dan juga mutu pendidikan. Di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 (1) yang menyatakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”(Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Akan tetapi, dalam praktiknya sendiri kebijakan dari penganggaran ini sering kali menghadirkan permasalahan. Di satu sisi pendidikan akan diakui sebagai sektor yang strategis, sementara itu di sisi lain alokasi dan juga relokasi anggaran ini justru berpotensi dalam melemahkan fungsi emansipatoris tersebut. Dalam konteks kebijakan, relokasi anggaran negara sering kali dilakukan untuk merespons program prioritas tertentu yang dianggap strategis secara politik maupun ekonomi. Kebijakan tersebut dapat berpotensi menciptakan konsekuensi apabila dilakukan dengan mengurangi pembiayaan sektor pendidikan. Kebijakan relokasi anggaran pendidikan untuk dapat mendukung program MBG (Makan Bergizi Gratis) akan memunculkan perdebatan mengenai pembangunan manusia, terutama apabila pemotongan dana pendidikan ini akan berdampak pada berkurangnya fasilitas, program pendukung belajar ataupun akses pendidikan yang lainnya. Perubahan alokasi anggaran dapat memperlebar kesenjangan mutu antar sekolah, memperkuat stratifikasi sosial dalam akses pendidikan, dan membatasi kelompok rentan untuk memperoleh modal pendidikan yang memadai (Wilfridus et al., 2025).

Hal tersebut dapat dianalisis melalui konsep reproduksi sosial dari Pierre Bourdieu yang melihat bahwa pendidikan ini bukanlah sebagai ruang yang netral akan tetapi sebagai arena tempat berbagai bentuk modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Dalam hal ini Bourdieu menjelaskan bahwa ketimpangan dalam distribusi modal akan menghasilkan reproduksi struktur kelas secara halus melalui mekanisme institusional seperti sekolah. Dengan demikian, ketika negara mengurangi dukungan anggaran pendidikan, kelompok yang telah memiliki modal kuat tetap mampu mempertahankan dominasinya, sementara kelompok marginal semakin kehilangan akses terhadap sumber daya pembentuk mobilitas sosial (Haris Wicaksono, 2024).

B. Metode Penelitia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur. Sarwono (2006) menyatakan bahwa studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku

referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang di akan teliti. Studi literatur disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian pustaka. (Munib & Wulandari, 2021)

Peneliti kualitatif akan berperan sebagai *human instrument*, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. kegiatan ini hanya mengarah pada produksi artikel, jurnal dan koleksi perpustakaan tanpa perlu penelitian lapangan. (Hardani & Nurhikmatul Auliya, 2020)

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program MBG dan Raionalias Kebijakan Pembangunan Manusia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun pertama. program tersebut memiliki potensi signifikan untuk menurunkan prevalensi malnutrisi, meningkatkan partisipasi sekolah, serta memberikan dampak ekonomi positif melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan petani lokal. Meskipun menjanjikan keuntungan ekonomi senilai $4 hingga $16 untuk setiap dolar yang diinvestasikan, implementasi program ini menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan fiskal, standar keamanan pangan, dan kompleksitas koordinasi logistik di wilayah geografis Indonesia yang luas. Keberhasilan jangka panjang program ini sangat bergantung pada mekanisme pemantauan yang ketat, manajemen adaptif, serta penguatan koordinasi antar-lembaga guna memastikan distribusi sumber daya yang adil dan peningkatan hasil kesehatan serta pendidikan yang terukur. (Maliki, 2025).

Trade-Off Fiskal dan Tantangan Keberlanjutan

Meskipun MBG berpotensi besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi, kehadiran, dan konsentrasi belajar siswa, program ini menghadapi tantangan serius berupa besarnya alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun yang dapat menciptakan *trade-off* dengan investasi struktural pendidikan

lainnya. Selain itu, terdapat risiko politisasi dan ketergantungan pada siklus pemilu, serta kelemahan tata kelola terkait standar keamanan pangan dan disparitas kapasitas antar daerah. Oleh karena itu kebijakan MBG dapat dikatakan bergantung pada penguatan regulasi, sinergi dengan program mutu pendidikan lainnya. (Masruri & Nugraha, 2026)

Secara jangka pendek, MBG memang berpotensi meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa, namun pendidikan sebagai sistem tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi semata, namun juga ditentukan oleh kualitas infrastruktur, kompetensi guru, kurikulum, fasilitas pendukung, serta lingkungan pembelajaran yang memadai. Apabila alokasi anggaran pendidikan mengalami tekanan akibat prioritas fiskal baru, maka dampak jangka panjang terhadap mutu pendidikan perlu dikaji ulang secara lebih mendalam.

Arena Pendidikan dan Distribusi Modal dalam Perspektif Pierre Bourdieu

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pendidikan merupakan arena (*field*), yakni ruang sosial yang memiliki aturan main, hierarki, serta mekanisme kompetisi tersendiri. Arena pendidikan menjadi tempat berlangsungnya pertarungan berbagai bentuk modal, yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Arena ini tidak pernah bersifat netral, melainkan terstruktur oleh relasi kekuasaan dan distribusi modal yang timpang. Oleh karena itu, sekolah bukan hanya sekedar ruang untuk mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga merupakan ruang produksi dan legitimasi dari ketimpangan sosial.

Relokasi anggaran pendidikan untuk mendukung MBG dapat dipahami sebagai intervensi negara yang mengubah konfigurasi distribusi modal dalam arena pendidikan. Negara sebagai pemegang ototitas tertinggi dalam distribusi sumber daya publik memiliki posisi paling dominan dalam menentukan struktur peluang dalam arena tersebut. Ketika dukungan fiskal terhadap pendidikan mengalamai tekanan, sekolah-sekolah yang sangat bergantung pada anggaran negara seperti sekolah negeri yang berada di wilayah tertinggal berisiko mengalami penurunan kapasitas dalam menyediakan modal budaya yang berkualitas. Hal ini kemudian dapat

terlihat ketika terjadinya keterbatasan fasilitas belajar, berkurangnya program pengayaan akademik, terbatasnya akses terhadap teknologi pendidikan, hingga terhambatnya program peningkatan kompetensi guru.

Dalam kondisi seperti ini, arena pendidikan menjadi semakin kompetitif dan tidak seimbang. Sekolah dengan dukungan finansial orang tua yang kuat, reputasi lembaga yang tinggi, serta yang memiliki jaringan sosial yang luas tetap mampu mempertahankan kualitasnya melalui sumber daya mereka. Mereka dapat memperoleh dana tambahan, menarik guru-guru yang berkualitas, serta menyediakan fasilitas unggulan yang dapat memperkuat posisi simbolik mereka dalam hierarki pendidikan. Namun sebaliknya, bagi sekolah dengan ketergantungan tinggi pada dana publik tidak memiliki kapasitas yang sama untuk melakukan hal tersebut.

Akibat yang akan terjadi adalah distribusi modal yang menjadi semakin tidak merata. Modal ekonomi memungkinkan keluarga dari kelas menengah dan kelas atas untuk mengakses sekolah swasta unggulan, memberikan bimbingan belajar, kursus belajar tambahan, serta memberikan teknologi yang mampu menunjang proses pembelajaran. Modal budaya diwariskan melalui kebiasaan literasi di rumah, pola komunikasi yang terjalin sesuai dengan bahasa akademik, serta memiliki orientasi jangka panjang terhadap pendidikan tinggi. Adapun modal sosial yang dimiliki yakni membuka akses terhadap jaringan informasi, rekomendasi, dan peluang pendidikan yang lebih luas. Sementara itu modal simbolik yang mereka miliki seperti prestise sekolah atau reputasi keluarga memberikan mereka legitimasi atas keberhasilan akademik yang mampu mereka peroleh.

Dalam kerangka seperti ini, relokasi anggaran bukan hanya soal pengurangan angka dalam dokumen fiskal, tetapi merupakan perubahan struktur peluang dalam arena pendidikan. Ketika negara mengurangi intensitas dukungan terhadap pendidikan, maka kelompok yang memiliki modal yang banyak tetap mampu mempertahankan posisinya. Namun sebaliknya, bagi kelompok dengan modal sedikit semakin bergantung pada kualitas

layanan publik yang justru dapat mengalami tekanan.

Lebih jauh lagi, Bourdieu menekankan bahwa sistem pendidikan cenderung mengakui dan menghargai bentuk modal budaya yang dekat dengan budaya kelas dominan. Artinya, standar evaluasi akademik sering kali secara implisit selaras dengan habitus kelas menengah dan kelas atas. Dalam situasi ketimpangan sumber daya seperti ini, mekanisme seleksi ini bekerja semakin kuat. Siswa dari kelompok marginal tidak hanya mengjadapi keterbatasan fasilitas, namun juga menghadapi standar akademik yang kurang selaras dengan latar belakang sosial mereka. Maka reproduksi ketimpangan sosial terjadi.

Dengan demikian, relokasi anggaran pendidikan dalam program MBG dapat berpotensi memperdalam sttatifikasi dalam arena pendidikan. Kebijakan tersbeut, meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui intervensi gizi, namun juga dari program tersebut dapat menggeser keseimbangan dari distribusi modal dan memperkuat domunasi kelompok yang telah memiliki akumulasi modal sejak awa. Sehingga arena pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai mobilitas sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai arena reproduksi struktur kelas yang dapat berlangsng secara sistematis dan berkelanjutan.

Habitus, Kekerasan Simbolik, dan Mekanisme Reproduksi Sosial

Konsep *habitus* menurut Bourdieu merupakan sebuah disposisi yang telah tertanam secara mendalam dalam diri individu melalui proses sosialisasi yang panjang. Habitus merupakan gaya hidup, nilai-nilai, karakter, dan harapan kelompok tertentu yang menjadi sumber penggerak tindakan, pemikiran, dan representasi (Bourdieu, 1990 dalam (Andini et al., 2019). Habitus membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, menilai, dan bertindak dalam berbagai situasi sosial termasuk juga dalam arena pendidikan. Habitus ini bukan hanya sekedar kebiasaan, namun merupakan struktur internal yang kemudian secara tidak sadar dapat mengarahkan pada preferensi, aspirasi, serta persepsi tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin dicapai.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, siswa yang berasal dari

keluarga kelas menengah dan atas umumnya tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan modal budaya. Mereka terbiasa dengan praktik literasi, diskusi akademik, dukungan belajar dari orang tua, serta ekspektasi tinggi terhadap pendidikan tinggi. Habitus yang terbentuk dalam lingkungan seperti ini cenderung selaras dengan norma dan standar institusi sekolah. Bahasa yang digunakan di rumah, cara mereka menyampaikan pendapat, hingga pola interaksi sosial mereka sering kali sesuai dengan kriteria yang dihargai oleh sistem pendidikan.

Sebaliknya, siswa yang berasal dari kelompok marginal sering kali tidak memiliki kebiasaan atau modal budaya yang diakui oleh sekolah. Habitus yang mereka miliki dibentuk oleh kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berbeda dan bahkan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan standar akademik. Secara umum, sekolah yang berkualitas harusnya mampu berperan sebagai jembatan untuk mentransformasikan habitus tadid an menyediakan akses terhadap modal budaya baru. Namun, ketika terjadi relokasi anggaran yang berpotensi melemahkan kualitas pendidikan publik, maka fungsi sekolah sebagai jembatan penghubung tadi menjadi terancam.

Dengan kondisi tersebut, ketimpangan habitus semakin kuat. Siswa yang berasal dari kelas atas tetap memiliki dukungan eksternal, bimbingan belajar, kursus tambahan, akses teknologi, serta lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan prestasi atau performa akademik mereka. Namun sebaliknya, bagi siswa yang berasal dari kelompok marginal maka mereka akan semakin bergantung pada kualitas sekolah yang justru mengalami tekanan akibat keterbatasan anggaran. Ketimpangan yang awalnya dapat direduksi melalui intervensi pendidikan namun nyatanya melalui pendidikan juga dapat mereproduksi ketimpangan itu sendiri.

Mekanisme ini kemudian bekerja melalui apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang berlangsung secara halus, tidak kasat mata, dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan simbolik terjadi ketika nilai, norma, dan standar kelompok dominan

dipaksakan sebagai standar universal tanpa disadari sebagai bentuk dari dominasi. Dalam teori kekuasaan simbolik menyatakan bahwa dalam interaksi sosial termasuk pendidikan terdapat mekanisme kekuasaan yang bersifat tidak tampak namun sangat berpengaruh terhadap hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan yang dikuasai (Hasanah et al., 2025). Dalam sistem pendidikan, standar evaluasi akademik seperti cara berbicara, gaya penulisan, atau pola berpikir sering kali mencerminkan budaya kelas dominan yang dipaksakan dan kemudian ditetapkan menjadi standar.

Dalam konteks relokasi anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai langkah rasional demi pembangunan sumber daya manusia. Narasi-narasi yang disampaikan yakni upaya peningkatan gizi dan kesejahteraan siswa memberikan legitimasi moral yang kuat. Namun apabila kebijakan tersebut secara struktural mengurangi kapasitas institusi pendidikan dalam mendistribusikan modal budaya secara merata, maka ketimpangan yang muncul tidak lagi terlihat sebagai akibat kebijakan, melainkan sebagai akibat dari kurangnya kemampuan dari individu ataupun keluarga dalam memberikan modal budaya.

Dari sinilah kekerasan simbolik dijalankan. Ketika siswa dari kelompok marginal mengalami kesulitan akademik akibat keterbatasan sumber daya struktural, maka kegagalan tersebut sering kali diinterpretasikan sebagai kurangnya usaha, disiplin atau motivasi diri. Struktur ketimpangan yang melatarbelakanginya menjadi tidak terlihat. Pendidikan tetap tampak sebagai sistem meritokrasi yang adil, padahal nyatanya melalui pendidikan jugalah kondisi distribusi modal tidak seimbang diproduksi.

Dalam jangka panjang, mekanisme ini menghasilkan reproduksi sosial antar generasi. Anak-anak dari keluarga dengan modal yang banyak mampu mempertahankan atau meningkatkan posisi sosialnya melalui sistem pendidikan yang mengakui dan melegitimasi modal mereka. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga dengan modal terbatas menghadapi hambatan berlapis yang membuat mereka sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Relokasi anggaran apabila tidak diimbangi dengan

perlindungan terhadap kualitas pendidikan yang baik maka dapat berpotensi memperkuat terjadinya siklus yang berulang tersebut.

Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks ini tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial, melainkan sebagai mekanisme reproduksi struktur kelas, Kebijakan yang tampak netral dan rasional dapat secara tidak langsung memperkuat stratifikasi sosial apabila tidak mempertimbangkan distribusi habitus dan modal yang telah simpang sejak awal. Oleh karena itu, diperlukannya analisis kebijakan pendidikan yang mampu menempatkan dimensi struktural sebagai pertimbangan utama agar intervensi negara tidak memperdalam ketidaksetaraan yang ingin diatasi.

Implikasi Struktural terhadap Ketidaksetaraan Sosial

Relokasi anggaran pendidikan dalam mendukung program MBG perlu dipahami bukan sekadar sebagai kebijakan teknokratis, namun juga sebagai keputusan politik ekonomi yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap struktur sosial. Kebijakan fiskal selalu merefleksikan prioritas negara dalam mendistribusikan sumber daya. Ketika alokasi pada sektor pendidikan mengalami penyesuaian untuk mendukung program lain, maka yang berubah bukan hanya angka anggaran, tetapi juga konfigurasi peluang sosial dalam masyarakat.

Secara normatif, MBG memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi. Lalu, dalam jangka pendek kebijakan ini juga dapat memperbaiki kesehatan dan meningkatkan kesiapan belajar siswa. Namun, pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis seperti asupan nutrisi saja, melainkan juga oleh kualitas institusi pendidikan sebagai ruang akumulasi modal budaya dan sosial. Apabila relokasi anggaran berdampak pada penurunan kualitas fasilitas, maka keterbatasan program akademik atau terhambatnya peningkatan kompetensi guru, merupakan efek jangka panjang terhadap mobilitas sosial yang perlu dikaji secara lebih lanjut.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, struktur sosial direproduksi melalui mekanisme yang tampak wajar dan institusional, termasuk

melalui sistem pendidikan. Ketika distribusi modal tidak seimbang dan negara tidak menyediakan mekanisme peninjauan yang memadai, maka justru pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana yang melegitimasi perbedaan sosial. Kelompok dengan akumulasi modal yang banyak tetap dapat memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, namun bagi kelompok dengan modal sedikit maka mereka akan semakin bergantung pada kualitas layanan publik yang mungkin mengalami tekanan akibat keterbatasan anggaran.

Implikasi struktural dari kondisi ini adalah menguatnya stratifikasi sosial antar sekolah dan antar wilayah. Sekolah di daerah dengan dukungan sosial ekonomi yang kuat cenderung mampu mempertahankan mutu, sementara sekolah di wilayah tertinggal semakin kesulitan bersaing. Ketimpangan tersebut pada akhirnya memengaruhi peluang akses ke pendidikan tinggi, pasar kerja, dan posisi sosial di masa depan. Dengan demikian, relokasi anggaran yang tidak disertai pengamanan kualitas pendidikan dapat memperluas gap antar kelas secara menyeluruh.

Tanpa mekanisme yang menjamin stabilitas dan peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, intervensi negara berpotensi menggeser fungsi pendidikan dari sarana emansipasi menjadi instrumen pelestarian hierarki sosial. Pendidikan yang idealnya menjadi ruang mobilitas vertikal justru dapat bertransformasi menjadi ruang seleksi sosial yang dapat memperkuat posisi kelompok dominan. Dalam situasi ini, ketidaksetaraan tidak hanya bertahan, tetapi direproduksi secara terus menerus antar generasi. Oleh karena itu, analisis kebijakan program MBG harus dilakukan evaluasi program di setiap sektor. Evaluasi yang dilakukan juga perlu mempertimbangkan dimensi sosiologis yang lebih luas, yakni bagaimana distribusi modal, habitus, serta relasi kekuasaan dalam arena pendidikan saling berinteraksi. Kebijakan yang sensitif terhadap ketimpangan struktural seharusnya memastikan bahwa intervensi di bidang gizi tidak mengorbankan investasi jangka panjang dalam kualitas pendidikan. Tanpa keseimbangan tersebut, relokasi anggaran berpotensi memperkuat reproduksi ketidaksetaraan sosial

yang justru ingin diatasi melalui pembangunan manusia.

Sebagai implikasi normatif, negara perlu merancang kebijakan yang tidak hanya bersifat substitutif, melainkan bersifat komplementer. Artinya, program peningkatan gizi dan peningkatan mutu pendidikan harus berjalan secara baik. Dengan pendekatan yang integratif dan berkeadilan, maka pendidikan dapat tetap menjalankan fungsi transformasinya sebagai sarana mobilitas sosial, bukan sebagai mekanisme reproduksi struktur kelas.

D. Kesimpulan

Relokasi anggaran pendidikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memiliki implikasi struktural terhadap konfigurasi ketidaksetaraan sosial. Meskipun program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan peserta didik, kebijakan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang apabila dilakukan melalui pengurangan dukungan fiskal terhadap sektor pendidikan.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, pendidikan dipahami sebagai arena sosial yang sarat dengan relasi kuasa dan pertarungan berbagai bentuk modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Ketimpangan distribusi modal dalam arena pendidikan memungkinkan terjadinya reproduksi struktur kelas secara sistematis. Apabila relokasi anggaran mengakibatkan melemahnya kualitas layanan pendidikan publik, terutama di wilayah dan kelompok sosial yang rentan, maka pendidikan berisiko kehilangan fungsi emansipatorisnya sebagai sarana mobilitas sosial. melalui mekanisme habitus dan kekerasan simbolik, ketidaksetaraan tersebut dapat direproduksi secara halus dan dilegitimasi sebagai hasil dari kompetisi yang dianggap meritokratis. Dalam kondisi demikian, kelompok yang telah memiliki akumulasi modal cenderung tetap mempertahankan dominasinya, sementara kelompok dengan modal terbatas semakin mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, tanpa desain kebijakan yang sensitif terhadap dimensi struktural, relokasi anggaran pendidikan berpotensi

memperkuat stratifikasi sosial antar generasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hardani & Nurhikmatul Auliya. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Artikel in Press:

Maliki, A., Selvi, N., Arifah, A., & Assa, N. S. (2025). Analisis kebijakan makan bergizi gratis Prabowo-Gibran dan dampaknya terhadap kesehatan dan bidang pendidikan. *11*, 465–476.

Masruri, G. G., & Nugraha, H. (2026). Program makan bergizi gratis sebagai instrumen politik janji pemilu: Analisis kebijakan anggaran dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas 204*., 4*(4), 12100–12108.

Wilfridus, N., Ahmad, M., & Heni, R. (2025). Evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi: Implikasi bagi kesetaraan sosial.

Jurnal :

Andini, P. W., Amirudin, A., & Purnomo, M. H. (2019). Bullying sebagai arena kontestasi kekuasaan di kalangan siswa SMA Jakarta. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 2*(2), 119-130. https://doi.org/10.14710/endogami.2.2.119-130

Hasanah, U., Jufri, J., & Saleh, M. (2025). Representasi kekuasaan simbolik dalam pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka kelas X (Kajian wacana kritis Pierre Bourdieu). *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10*(2), 1167–1177. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i2.1783

Munib, A., & Wulandari, F. (2021). Studi literatur: Efektivitas model kooperatif tipe course review horay dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 7*(1), 160–172. https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16154

Wicaksono, H. (2024). Social reproduction in schools of excellence from the perspective of Pierre Bourdieu. *Jurnal Kependidikan, 13*(1), 1019–1028.